KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pembangunan di Nduga Jangan Dihentikan
Tanggal : Rabu, 07 Agustus 2019
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 22

Pembangunan di Nduga Jangan Dihentikan

DPR Segera Undang Panglima TNI dan Kapolri untuk Evaluasi

[JAKARTA] Bupati Kabupaten Nduga, Papua, Yairus Gwijngge meminta pemerintah pusat agar tidak menghentikan proyek infrastruktur di daerahnya. Permintaan itu diungkapkan saat dia bertemu dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon di ruang rapat pimpinan lantai 3 Nusantara III Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/8).

"Kami dengar, katanya infrastruktur jalan akan diberhentikan. Padahal kami dan masyarakat di sana tidak menolak pembangunan. Jadi kami mohon pak ketua DPR tolong sampaikan ke presiden Jokowi agar pembangunan di Nduga tetap dilanjutkan," tambah Yairus.

Menurut dia, apa yang terjadi di Nduga karena ketakutan masyarakat akibat konflik bersenjata antara TNI dan Polri dengan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB). Pada saat situasi seperti itu diduga ada aparat yang menembak ternak warga. Akibatnya, warga dari 11 distrik ketakutan dan melarikan diri ke kabupaten terdekat.



DOK DPR RI

Bupati kabupaten Nduga Provinsi Papua, Yairus Gwijangge beserta rombongan menyambangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Untuk itu, Yairus meminta kepada pimpinan DPR agar segera menarik pasukan TNI-Polri dari wilayah Nduga. "Jadi, Pak Ketua DPR, lebih bagus turun ke lapangan, melihat kondisi yang sebenarnya," tutur Yairus kepada Bambang Soesatyo.

Ditambahkan oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Nduga, Namia Gwijangge, dampak dari konflik sosial yang melanda Nduga mengakibatkan sejumlah sekolah di daerah tersebut tidak beroperasi. "Pendidikan di sana tidak dilayani. Puskesmas pelayanan kesehatan pun tidak jalan, bahkan ada 98 gereja yang kosong," ungkap dia.

Namia menyebutkan, sekitar 45.000 warga Nduga telah mengungsi ke tempat aman akibat konflik. Jumlah itu setengah dari total populasi di sana yang mencapai 73.696 jiwa. Namia berharap, pemerintah pusat agar segera membiayai para pengungsi Nduga yang terlantar di beberapa daerah di Kabupaten Mimika hingga ke kota Jayapura tersebut."Warga kami butuh tempat tinggal, sejauh ini kami berusaha membantu. Tapi tidak sanggup lagi karena keterbatasan APBD yang minim," jelasnya.

Desak Kemsos

Menanggapi hal ini, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, soal bantuan akan disampaikan ke Komisi VIII DPR untuk mendesak Kementerian Sosial (Kemsos) agar segera menangani pengungsi. "Tidak ada rakyat kita yang menderita, ini adalah tanggung jawab Negara yang telah diamanatkan oleh UUD 1945," katanya.

Terkait dengan keamanan, Bamsoet mengatakan akan berkoordinasi bersama Komisi I DPR RI untuk mengundang Panglima TNI, guna melakukan evaluasi. "Saya juga akan teruskan informasi ini ke Komisi III DPR untuk mengundang Kapolri. Apakah pihak keamanan harus dipertahankan atau dikurangi. Tapi yang jelas semua Stakeholder, pemerintah pusat, Pemerintah daerah dan unsur keamanan harus kita duduk bersama, guna untuk mencari solusi terbaik," tandasnya. [154/H-14]